



LAPORAN TRIWULAN-4 TA. 2024

*BALAI
BESAR
PENGUJIAN
STANDAR
INSTRUMEN
PASCAPANEN
PERTANIAN*

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Monitoring Triwulan kinerja pelaksanaan program/kegiatan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan monitoring triwulan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Kegiatan Teknis dan Dukungan Manajemen lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen Pertanian), yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output/fisik dan tingkat penyerapan anggaran.

Laporan triwulan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaanpelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat.

Bogor, 31 Desember 2024
Kepala Balai Besar Pengujian Standar
Instrumen Pascapanen Pertanian



Dr. Asmarhansyah, S.P., M.Sc.
NIP 197102241998031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
I PENDAHULUAN	4
1.1. Tujuan	5
1.2. Sasaran	5
II AKUNTABILITAS KINERJA	7
2.1. Capaian Kinerja	7
2.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya	8
III KEGIATAN STRATEGIS	9
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	9
3.1.1. Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan/Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	9
3.1.2. Produk Instrumen Pascapanen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	28
3.1.3. Standar Instrumen Pascapanen Pertanian yang didiseminasikan	29
3.1.4. Lembaga Penerap Standar yang didampingi	29
3.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	33
IV KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN	35
4.1. Evaluasi Aplikasi Monev Online	35
4.1.1. Aplikasi SMART DJA	35
4.1.2. Aplikasi e-Monev Bappenas	36
4.1.3. Aplikasi e-Monitoring BSIP	37
4.1.4. Aplikasi e-SAKIP	37
4.1.5. Laporan Keuangan (Realisasi Anggaran)	38
4.2. Evaluasi Kegiatan Manajemen	41
4.2.1. Pengelolaan dan Pengembangan SDM	41
4.2.2. Pengelolaan Aset	41
4.3. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	57
V KESIMPULAN DAN PENUTUP	59
5.1. Evaluasi Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya	59
5.2. Kesimpulan	59
5.3. Saran dan Penutup	60

I. PENDAHULUAN

Balai Besar Pengujian Standarisasi Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen Pertanian) merupakan salah satu Unit Kerja dari BSIP (Badan Standarisasi Instrumen Pertanian), sesuai dengan PERMENTAN 13/2023 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis lingkup BSIP memiliki tugas melaksanakan pengujian standar instrumen pascapanen pertanian, dengan Fungsi: a) Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen pascapanen pertanian; b) Pelaksanaan analisis, pengujian, dan tindakan korektif pengujian standar instrumen pascapanen pertanian; c) Pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi, dan penilaian kesesuaian standar instrumen pascapanen pertanian; d) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen pascapanen pertanian; e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen pascapanen pertanian; f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan Rumah tangga BBPSI Pascapanen Pertanian. Berdasarkan tugas dan fungsinya tersebut, pada tahun 2024 BBPSI Pascapanen memiliki beberapa kegiatan strategis mendukung program nilai tambah dan daya saing industri, yaitu:

- 1) Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, terdiri dari:
 - a. Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian dengan target output 4 standar, mencakup: 1) Analisis Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (Revisi SNI Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian); 2) Analisis Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (RSNI Penanganan Pascapanen Bawang Merah untuk Konsumsi); 3) Analisis Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (RSNI Susut padi); 4) Analisis Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (RSNI Penanganan Proses Pascapanen Daun Rajang Kering Talas Beneng); 5) Lembaga Sertifikasi Produk, Jasa, Proses (LSPro); 6) Pengelolaan Komisi Teknis SNI dan CODEX; dan 7) Perumusan PNPS Pascapanen Pertanian.
 - b. Instrumen mutu pascapanen pertanian yang diuji dengan target output 60 produk
- 2) Dukungan Manajemen Fasilitasi Standarisasi Instrumen Pertanian, terdiri dari:
 - a. Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan target output 4 layanan, mencakup: 1) Layanan BMN (Pelaksanaan Pengelolaan BMN, Pengelolaan Barang Milik Negara); 2) Layanan Hubungan Masyarakat (Pendampingan Dukungan Penas); 3) Layanan Umum (Layanan Kerumahtanggaan dan Umum: Manajemen Tata Usaha dan

Kelembagaan Internal dan Layanan Informasi Publik, Layanan Pengelolaan PNBPN: Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium); 4) Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan; Operasional dan Pemeliharaan Kantor: Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa, dan Pemeliharaan Kantor; dan Pembayaran Terkait Operasional Kantor).

- b. Layanan Manajemen SDM Internal dengan target output 88 orang, mencakup: Pengelolaan Manajemen Kepegawaian (Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian).
- c. Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan target output 3 layanan, mencakup: 1) Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Penyusunan Rencana Program dan Anggaran: Perencanaan Program dan Anggaran, Koordinasi Institusional); 2) Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi: Pelaksanaan Monev, SPI Manajemen Risiko Index, Reformasi Birokrasi); 3) Layanan Manajemen Keuangan (Pengelolaan Keuangan: Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan, dan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran).

1.1. Tujuan

BBPSI Pascapanen Pertanian memiliki visi: "Menjadi unit pelaksana teknis yang akuntabel, kompeten, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam standardisasi instrumen pascapanen mewujudkan pertanian maju, mandiri, modern". Untuk mewujudkan visi tersebut, maka BBPSI Pascapanen Pertanian memiliki misi: melaksanakan kegiatan standardisasi instrumen pascapanen pertanian mendukung program peningkatan nilai tambah dan daya saing pertanian.

1.2. Sasaran

Dalam mewujudkan visi misinya tersebut, BBPSI Pascapanen Pertanian memiliki sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yaitu:

- 1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, dengan indikator kinerja kegiatan berupa Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan, target tahun ini 4 Standar.
- 2) Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja kegiatan

berupa Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 82 (Nilai).

- 3) Terkelolanya Anggaran Badan Standarisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 85 (Nilai).

II. AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Capaian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian TA. 2024, terdapat 3 IKSK (Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan) yang mendukung pencapaian IKSP (Indikator Kinerja Sasaran Program) BSIP. Berdasarkan Renaksi yang telah disusun di lingkup BSIP, BSIP memiliki sasaran program pertama (SP1) berupa Meningkatnya daya saing komoditas pertanian, dengan indikator kinerja sasaran program (IKSP): Persentase penerapan standar instrumen pertanian, terdiri dari: a) Data SNI yang sudah diterapkan oleh pengguna, b) Data SNI yang ditetapkan oleh BSN dari hasil penyusunan RSNI di BSIP. Pada SP1 ini, sesuai PK BBPSI Pascapanen Pertanian yang memiliki sasaran kegiatan: Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, dengan indikator kinerja kegiatan berupa Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan, target tahun ini 4 Rancangan, maka BBPSI Pascapanen Pertanian hanya berkontribusi pada IKSP kedua, yaitu Data SNI yang ditetapkan oleh BSN dari hasil penyusunan RSNI di BSIP.

BBPSI Pascapanen Pertanian juga berkontribusi pada capaian IKSP3 BSIP, yang memiliki SP3 berupa 'Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima' dengan indikator kinerja sasaran kegiatan di BSIP adalah Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Adapun capaian keberhasilan indikator tersebut sampai dengan akhir triwulan ketiga tahun 2024 adalah sebagai berikut: Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi BSIP sebesar 85%, telah dilakukan review oleh Itjen dengan hasil penilaian sebesar 80,30.

Sasaran Kegiatan di BBPSI Pascapanen Pertanian yang mendukung SP3 BSIP: Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 82.

Sasaran Kegiatan di BBPSI Pascapanen Pertanian yang mendukung SP4 BSIP: Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan

indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 85 (Nilai).

2.2 Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan capaian kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian diantaranya:

- Adanya pemblokiran anggaran dan *Automatic Adjustment* (AA).
- Terdapat kegiatan yang baru bisa berjalan dikarenakan pembukaan blokir

Adapun beberapa upaya pemecahan permasalahan diatas diantaranya:

- Pemacuan serapan anggaran dan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan efisiensi ataupun anggaran yang tersedia.
- Diadakan rapat intensif dan penguatan tim untuk berkoordinasi dengan komtek secara lebih intens.
- Mempercepat kegiatan secara internal, serta kegiatan dilaksanakan mengikuti agenda BSIP.

III. KEGIATAN STRATEGIS

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan keempat 2024 sebesar Rp1.106.433.086,00 (92,20%) dan capaian fisik sebesar 98%. Berikut capaian kinerja dari kegiatan teknis di BBPSI Pascapanen Pertanian.

3.1.1. Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian yang dihasilkan/Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

1) Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

a. Penyusunan Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan keempat 2024 sebesar Rp550.644.110,00 (91,77%) dan capaian fisik sebesar 98%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- i) *RSNI Penanganan Proses Pascapanen Daun Rajang Kering Talas Beneng*, realisasi fisik kegiatan ini sampai dengan akhir triwulan keempat 2024 sebesar 90%, dengan perkembangan kegiatan yaitu :
 - Telah dihasilkan RSNI 3 untuk RSNI penanganan proses pascapanen daun rajang talas beneng. Selanjutnya dilakukan proses jajak pendapat oleh BSN dengan periode jajak pendapat mulai tanggal 23 September hingga 22 Oktober 2024.



Gambar 1. Flyer jajak pendapat RSNI Talas Beneng

- Analisa sampel. Sampling bahan baku berupa daun rajangan kering talas beneng diperoleh dari Lumajang dan Banten. Sampling diambil langsung dari lokasi ketika melakukan kunjungan ke pelaku usaha. Analisa sampel dilakukan di Laboratorium PBMB dengan parameter analisis antara lain cemaran mikro, residu pestisida, dan logam berat.
- Telah ditetapkan SNI 9279:2024 Pedoman proses pascapanen daun talas beneng (*Xanthosoma undipes* K. Koch) melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 537/KEP/BSN/11/2024.
- Penyusunan laporan akhir disusun berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan selama 1 tahun. Bagian hasil dan pembahasan disusun beberapa sub bab seperti desk studi, survei dan koordinasi dengan stakeholder terkait, pengambilan dan pengujian sampel, penyusunan RSNI, Rapat Teknis, dan Rapat Konsensus.
- Telah ditetapkan SNI 9279:2024 Pedoman proses pascapanen daun talas beneng (*Xanthosoma undipes* K. Koch) melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 537/KEP/BSN/11/2024.
- Penyusunan laporan akhir disusun berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan selama 1 tahun. Bagian hasil dan pembahasan disusun beberapa sub bab seperti desk studi, survei dan koordinasi dengan stakeholder terkait, pengambilan dan pengujian sampel, penyusunan RSNI, Rapat Teknis, dan Rapat Konsensus.



Gambar 2. Penyusunan laporan akhir kegiatan

- ii) *RSNI Penanganan Pascapanen Bawang Merah untuk Konsumsi*, realisasi fisik kegiatan ini sampai dengan akhir triwulan keempat 2024 sebesar 90%, dengan perkembangan kegiatan yaitu:
- Telah dihasilkannya RSNI 3 melalui Rapat Konsensus selanjutnya ditindaklanjuti dengan jajak pendapat yang dilaksanakan oleh BSN untuk mendapatkan masukan dari khalayak masyarakat terkait RSNI sebelu disahkan menjadi SNI dengan periode jajak pendapat 1 Oktober hingga 30 Oktober 2024.



Gambar 3. Jajak pendapat RSNI bawang Merah

- Penyusunan rekomendasi
Rekomendasi disusun sebagai tindak lanjut rapat konsensus yang telah menghasilkan RSNI3, yaitu diantaranya perlu merekomendasikan revisi SNI 3159 2013 Bawang Merah karena ada beberapa substansi yang sudah tidak relevan. Rekomendasi akan disampaikan kepada Komisi Teknis 65-15 Hortikultura yang ada di Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura (PSI Hortikultura) BSIP, Kementerian Pertanian.
- Rekomendasi penyimpanan bawang merah konsumsi (verifikasi prosedur)
Rekomendasi juga disusun dalam rangka menindaklanjuti saran BSN terkait penyimpanan bawang merah konsumsi yang selama ini di lapangan tidak ditemukan bawang merah konsumsi yang disimpan.

- Telah ditetapkan SNI 9289-2024 Pedoman Proses Pascapanen Bawang Merah (*Alium cepa* Var *ascalonicum* syn *Alium cepa* Var *agregatum*) konsumsi melalui keputusan kepala BSN nomor 554/KEP/BSN/11/2024.
- iii) *RSNI Metode Pengukuran Susut Pascapanen Padi*, realisasi fisik kegiatan ini sampai dengan akhir triwulan keempat 2024 sebesar 95%, dengan perkembangan kegiatan yaitu:
- Telah dihasilkannya RSNI 3 melalui Rapat Konsensus selanjutnya ditindaklanjuti dengan jajak pendapat yang dilaksanakan oleh BSN untuk mendapatkan masukan dari khalayak masyarakat terkait RSNI sebelum disahkan menjadi SNI dengan periode jajak pendapat 24 Oktober hingga 22 November 2024.



Gambar 4. Jajak pendapat RSNI Susut padi

- Telah dilakukan jajak pendapat 24 November hingga 22-November 2024. Sampai dengan tanggal 22 November 2024, Batas Maksimum Residu Pestsida pada Hasil Pertanian asal Tumbuhan tidak mendapatkan sanggahan atau tanggapan secara substantif, hanya secara format, sehingga RSNI ini menunggu untuk ditetapkan kemudian.
- Melakukan penyusunan laporan akhir kegiatan RSNI metode pengukuran susut pascapanen padi. Dalam laporan akhir kegiatan poin-poin yang disampaikan meliputi: Latar belakang, tujuan, ruang lingkup, tahapan kegiatan, anggaran,

capaian tujuan atau output kegiatan serta kendala dan solusi yang dilakukan agar kegiatan dapat berjalan baik dan mencapai sasaran kegiatan.

- Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 649/KEP/BSN/12/2024 tanggal 12 Desember 2024, Kepala Badan Standardisasi menetapkan SNI 9306:2024 Metode Pengukuran Susut Pascapanen Padi. Melakukan penyusunan laporan akhir kegiatan RSNI metode pengukuran susut pascapanen padi. Dalam laporan akhir kegiatan poin-poin yang disampaikan meliputi: Latar belakang, tujuan, ruang lingkup, tahapan kegiatan, anggaran, capaian tujuan atau output kegiatan serta kendala dan solusi yang dilakukan agar kegiatan dapat berjalan baik dan mencapai sasaran kegiatan.

iv) *Revisi SNI Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian*, realisasi fisik kegiatan ini sampai dengan akhir triwulan keempat 2024 sebesar 100%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Menindaklanjuti Ratek 2 pada tanggal 13 September 2024, telah dilaksanakan Rapat Konsensus pada tanggal 3 Oktober 2024 di Tandur Tandur Ciawi. Rakon dipimpin oleh Ketua Komtek 65-22, Dr. Asmarhansyah dan dihadiri oleh perwakilan BSN, anggota Komtek 65-22, Sekretariat Komtek 65-22 serta Tim Konseptor BMR Pestisida pada Hasil Pertanian Asal Tumbuhan. Melalui rapat ini disepakati RSNI 3 untuk RSNI batas maksimum pestisida untuk selanjutnya akan dilakukan jajak pendapat pada tanggal 24 oktober hingga 22 November 2024 sebelum disahkan menjadi SNI oleh BSN.
- Telah dilakukan jajak pendapat RSNI Batas Maksimum Residu Pestsida pada Hasil Pertanian asal Tumbuhan dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan 22 November 2024. Sampai dengan tanggal 22 November 2024, Batas Maksimum Residu Pestsida pada Hasil Pertanian asal Tumbuhan tidak mendapatkan sanggahan atau tanggapan secara substantif, hanya secara format, sehingga RSNI ini menunggu untuk ditetapkan kemudian.
- Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 648/KEP/BSN/12/2024 tanggal 12 Desember 2024, Kepala Badan Standardisasi menetapkan SNI 7313:2024 Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Komoditas

Pertanian Asal Tumbuhan merupakan revisi dari SNI 7313:2008 Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian dan SNI yang direvisi masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

v) *Penguatan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Pascapanen Pertanian* realisasi anggaran kegiatan ini sampai dengan akhir triwulan keempat 2024 sebesar Rp 230.232.538,00 (92,09%) dan realisasi fisik 100%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Pelatihan “Understanding Halal Principles in The Halal Food Industry”

Pelatihan ini merupakan implementasi proposal inisiatif Indonesia pada forum Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation (COMCEC), maka Kementerian Perdagangan dengan bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyelenggarakan pelatihan tersebut. Pelatihan bertujuan untuk mempromosikan standardisasi halal dan sertifikasi halal dalam ruang lingkup internasional secara luas pada ruang lingkup kerjasama COMCEC secara spesifik. Peserta pelatihan berasal dari Brunei Darussalam, Turkiye, SMICC, dan perwakilan dari K/L (Kementerian Perdadgangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Nasional, BPOM, dll).



Gambar 5. Pelatihan Understanding Halal Principles in The Halal Food Industry

- Konsultasi dan studi banding Operasionalisasi LSPro

Diskusi Balai Besar Pengujian Standardisasi Instrumen Pascapanen Pertanian sebagai Lembaga Sertifikasi Produk maka dilaksanakan konsultasi dan studi banding ke Balai Sertifikasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu,

Kementerian Perdagangan. Beberapa poin yang dihasilkan antara lain, dalam menentukan tarif sertifikasi, Balai Sertifikasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu mengacu pada PP tarif 50 tahun 2023, seluruh biaya yang dikenakan oleh PP Tarif 50 Tahun 2023 , biaya pendaftaran, audit kecukupan dokumen sistem mutu perusahaan, asesmen sistem manajemen dan proses produksi, asesmen proses produksi, pengambilan contoh, kajian sertifikasi awal/resertifikasi, kajian sertifikasi tipe I, penerbitan sertifikast, pemantauan mutu produk pelanggan sertifikasi, paket penambahan ruang lingkup termasuk biaya pengujian dibayarkan oleh perusahaan dan disetor dalam bentuk PNBK. Sesuai pasal 6, biaya akomodasi, transportasi, konsumsi dan uang harian juga dibayarkan oleh perusahaan kepada ke LSPro untuk kepentingan proses sertifikasi sesuai dengan SBM. Untuk LSPro di bawah Kementerian Pertanian mengacu pada PP Tarif No 28 Tahun 2023.



Gambar 6. Konsultasi operasionalisasi LSPro

- Diskusi dan audiensi dengan BPJPH terkait operasionalisasi LPH

Dalam rangka penjaminan mutu dan penyelenggaraan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) BBPSI Pascapanen Pertanian masih diperlukan beberapa informasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai pemangku yang membawahi LPH yang akan dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk tindakan selanjutnya terkait perubahan personil LPH, perubahan kualifikasi LPH dari Pratama ke Utama, survailen, dan pembiayaan.



Gambar 7. Audiensi dengan BPJPH

- Koordinasi dalam rangka FGD Harmonisasi Pengembangan dan Penerapan Standar mendukung LPK BBPSI Pascapanen Pertanian



Gambar 8. FGD harmonisasi Pengembangan penerapan standar

- Audit pemeriksaan halal produk air isi ulang Jasinga dan sidang komisi fatwa Kegiatan Berdasarkan surat permohonan pendafataran sertifikasi dari Pelaku Usaha Air Isi Ulang Jasinga ke Lembaga Pemeriksaan Halal BBPSI Pascapanen Pertanian pada tanggal 23 Juli 2024 perlu dilaksanakan audit terkait proses produksi dan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal pada tanggal 10 September 2024. Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap produk air isi ulang dengan merk Raufal telah disetujui oleh BPJPH untuk memperoleh sertifikat halal berdasarkan sidang Komisi Fatwa yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2024.



Gambar 9. Pelatihan pemantapan dan teknik audit dan PPC bidang pertanian

- Audit pemeriksaan halal di Pondok Nasi Bakar JJS.

Jumlah menu Makanan dan minuman yang diaudit berjumlah 62 produk. Audit dilakukan terhadap 5 kriteria SJPH, meliputi komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses, produk, serta pemantauan dan evaluasi.



Gambar 10. Melakukan audit halal ke Palaku Usaha

- Pemahaman SNI, Skema Sertifikasi dan prosedur pengoperasian skema gula palma
 - Audit internal LSPro dan LPH
- Kegiatan audit internal LSPro dan LPH dilakukan bersamaan dengan kegiatan audit internal integrasi pada tanggal 1-2 Oktober serta tanggal 8-9 Oktober 2024. Audit dilakukan terhadap dokumen mutu level 1 (Panduan mutu), level 2 (Prosedur Kerja), level 3 (Form/iK/lampiran). Berdasarkan hasil temuan audit internal tersebut akan segera dilakukan tindakan perbaikan.
- Persiapan audit sertifikasi ke pelaku usaha
 - Diskusi dilakukan juga terhadap form dan dokumen-dokumen yang akan

digunakan dalam kegiatan sertifikasi dan mekanisme sertifikasi. Hasil diskusi memutuskan bahwa kegiatan sertifikasi ditunda hingga dokumen pelaku usaha memenuhi persyaratan untuk pengajuan sertifikasi kesesuaian. Direncanakan kegiatan audit sertifikasi akan dilakukan pada pertengahan bulan November.



Gambar 11. Persiapan audit sertifikasi

- Pelatihan dan implementasi SNI/ISO 9001:2015 pada dokumen mutu perusahaan

Telah dilakukan kegiatan dalam rangka memberikan pelatihan dan membantu implementasi standar ISO 9001:2015 di PT Osyara Mitra Gemilang yang dilaksanakan pada tanggal 05 November. Pemahaman Dokumen Sistem Manajemen Mutu, Materi berfokus pada pentingnya dokumentasi dalam ISO 9001:2015, yang meliputi kebijakan mutu, manual mutu, prosedur operasional standar (SOP), instruksi kerja, dan formulir yang digunakan dalam proses produksi.



Gambar 12. Pelatihan dan implementasi SNI/ISO 9001:2015

- Sosialisasi dokumen sertifikasi LSPRO dan persiapan audit sertifikasi

Telah dilakukan diskusi terkait Penerapan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) Berdasarkan

Permenperin no 75 tahun 2010. Pada Kegiatan tersebut juga dilakukan proses audit kecukupan dokumen (Audit Tahap 1) terhadap dokumen PT OMG. Direncanakan kegiatan audit sertifikasi (audit tahap 2) dilakukan pada tanggal 18 November 2024. Pada kesempatan tersebut dilakukan pembagian dan penugasan tim audit dan PPC yang akan ditugaskan melakukan audit di PT OMG.



Gambar 13. Sosialisasi dokumen sertifikasi LSPro dan persiapan audit sertifikasi

- Sosialisasi dan promosi LSPro dan LPH BBPSI Pascapanen Pertanian

Kegiatan sosialisasi LSPro dan LPH BBPSI Pascapanen Pertanian selain menggunakan media cetak dan online, juga dilakukan dalam bentuk penempelan stiker pada body mobil operasional milik BBPSI Pascapanen Pertanian. Hal ini bertujuan sebagai sarana promosi yang gratis dan mobile, sehingga ketika mobil tersebut digunakan maka secara tidak langsung mengenalkan keberadaan LSPro



dan LPH BBPSI Pascapanen Pertanian.

Gambar 14. Audiensi dengan BPJPH

- Pelaksanaan audit sertifikasi kesesuaian SNI gula palma dan pengambilan contoh

Pelaksanaan kegiatan audit sertifikasi di lapangan (audit tahap 2) dilakukan pada tanggal 18 November 2024 dalam rangka melaksanakan audit sertifikasi produk gula palma pada PT Osyara Mitra Gemilang berdasarkan standar acuan sistem SNI ISO 9001:2015. Tim auditor terdiri dari Solechan (auditor kepala dan PPC kepala), Miskiyah (auditor anggota), Ermi Sukasih (auditor magang), Kirana Sanggrami Sasmitaloka (auditor magang), Resa Setia A (auditor magang), Dewi Rosmayanti (PPC magang), Ema Sri Mulyani (PPC magang), dan Intan Sofiah (PPC magang). Audit lapangan (site audit) dalam rangka Sertifikasi SPPT SNI Gula Palma di PT. Osyara Mitra Gemilang (PT. OMG) telah dilaksanakan sesuai agenda audit (F.LSPR.09). Audit dilakukan sesuai dengan surat tugas No 3688/TU.040/H.10/11/2024. Hasil audit kesesuaian ditemukan 23 (LKS) ketidaksesuaian berkategori minor dan 12 (LKS) berkategori observasi yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan dalam rangka penyelesaian proses sertifikasi SPPT SNI. Ringkasan hasil audit kategori minor.



Gambar 15. Pelaksanaan audit sertifikasi kesesuaian SNI gula palma dan pengambilan contoh

- Pelaksanaan sidang komisi fatwa hasil audit sertifikasi halal

Pelaksanaan sidang komisi fatwa telah dilakukan atas hasil pemeriksaan halal yang dilakukan oleh LPH BBPSI Pascapanen ke Pondok Nasi Bakar JJS. Sidang komisi fatwa dilakukan pada tanggal 20 November 2024. Sidang komisi fatwa dihadiri oleh auditor halal yang melakukan audit pemeriksaan halal ke PU tersebut serta tim admin. Hasil sidang diperoleh persetujuan dari Komisi fatwa bahwa Pondok Nasi Bakar JJS dalam bentuk ketetapan halal (KH), dimana dalam KH tersebut direkomendasikan bahwa PU tersebut dapat memperoleh sertifikat halal yang selanjutnya akan diproses penerbitan sertifikatnya oleh BPJPH.



Gambar 16. Pelaksanaan sidang komisi fatwa hasil audit sertifikasi halal

- Pelaksanaan audit pemeriksaan halal ke pelaku usaha

Telah dilakukan perjalanan dinas ke Pondok Sagu Metro dalam rangka melaksanakan audit sertifikasi halal yang diajukan oleh Pelaku usaha tersebut. Kegiatan pemeriksaan halal dilakukan selama 1 hari, dengan melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang dimiliki pelaku usaha, dokumen surat izin berusaha (NIB), dokumen penyelia halal, dokumen lainnya terkait implementasi SJPH di pelaku Usaha.



Gambr 17. Pelaksanaan audit pemeriksaan halal ke pelaku usaha

- Pemahaman Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tim LPH BBPSI Pascapanen Pertanian tentang Kriteria SJPH

- Audit internal LSPro dan LPH

- Beroperasinya LSPro BBPSI Pascapanen Pertanian. LSPro BBPSI Pascapanen telah melakukan sertifikasi kesesuaian mutu SNI Gula Palma di PT Osyara Mitra Gemilang (PT OMG) di Cianjur. Selain itu juga telah melakukan peninjauan sertifikasi ke beberapa pelaku usaha (penggilingan Padi (RMU) dan gula palma).

Saat ini LSPro BBPSI Pascapanen sedang dalam proses pendaftaran akreditasi untuk Ruang Lingkup (RL) Beras, biji Kopi, Gula Kristal Mentah (GKM), Gula Kristal Putih (GKP), Gula Rafinasi, Gula Palma, Pati sagu dan Tapioka; 2) Terakreditasinya LPH BBPSI Pascapanen Pertanian; 3) Beroperasinya LPH BBPSI Pascapanen Pertanian, dan telah melakukan audit pemeriksaan halal ke 6 pelaku usaha (PU) dengan Ruang Lingkup Jasa Penyembelihan (3 PU) dan Makanan dan minuman (3 PU).

vi) *Pengelolaan Sekretariat Mirror Committee Codex*

Realisasi anggaran kegiatan ini sampai dengan akhir triwulan keempat 2024 sebesar Rp 43.366.000,00 (86,73%) dan realisasi fisik 100%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Harmonisasi PerKabapanas BMR.

PerKaBapanas batas maksimum residu pestisida dalam pangan segar di peredaran disusun dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko peredaran pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan batas maksimal residu pestisida sehingga diperlukan pengawasan di peredaran.



Gambar 18. Harmonisasi perkabapanas BMR

- Survei Residu Pestisida untuk Data Dukung Codex - Cianjur

Tujuan pelaksanaan survei adalah: Melakukan identifikasi residu pestisida pada komoditas pertanian untuk data dukung Codex. Komoditas untuk pengujian residu pestisida adalah terung, alpukat, timun, buncis, cabai dan jagung.



Gambar 19. Survei Residu Pestisida untuk Data Dukung Codex - Cianjur

- Pengujian Sampel Residu Pestisida

Tim telah melakukan sampling untuk beberapa komoditas yaitu terung, alpukat, buncis, timun, cabai dan jagung.. Komoditas yang telah disampling ini kemudian dianalisa kandungan residu pestisidanya di Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB), Kementerian Perdagangan. Bahan aktif yang diujikan pada kelima komoditas pertanian tersebut adalah bahan aktif yang digunakan para petani, dimana informasi bahan aktif yang digunakan diketahui melalui wawancara saat sampling dilakukan. Bahan aktif informasi dari petani tersebut kemudian didiskusikan juga dengan Laboratorium BPMB apakah bisa dilakukan dalam pengujian untuk beberapa bahan aktif dalam satu komoditas. Dari hasil diskusi untuk satu komoditas dapat dilakukan pengujian untuk 1-5 bahan aktif jika teridentifikasi menggunakan satu instrumen yang sama.

- Mengikuti Kegiatan Workshop terkait Penyusunan data dukung MRLs Pestisida secara online.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 November 2024 dengan materi terkait:

- How Codex establishes Maximum Residue Levels for Pesticides through the Codex Committee on Pesticide Residues
- Data requirement for elaboration of Codex MRLs
- How to propose a Pesticide / Commodity Combination to CCPR to establish a Codex MRL
- Data collection and utilization for establishing food standards: Thailand Viewpoint
- Country Experience on Data Submission for Elaboration Codex MRLs: Malaysia

- Mengikuti Kegiatan Sidang ATFC secara online
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024 dengan penyampaian posisi Indonesia terkait bahan aktif yang sudah tidak mendapat data dukung dari perusahaan pestisida maupun negara-negara di dunia.
- Pengolahan data hasil pengujian residu pestisida
Kegiatan ini dilakukan melalui pengolahan data hasil pengujian residu pestisida pada tahun 2024
- Evaluasi
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 November 2024 membahas terkait penilaian residu pestisida dan tindak lanjut kegiatan pada tahun 2025
- Penyampaian Keragaan Data dan Kesimpulan Umum Survei terkait Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Menindaklanjuti sidang Codex Committee on Pesticide Residue (CCPR) ke 55 terkait batas maksimum residu (BMR) pestisida dunia, BBPSI Pascapanen Pertanian sebagai Koordinator Mirror Committee CCPR telah melaksanakan survei residu pestisida pada beberapa komoditas pertanian di wilayah sentra produksi pada bulan September – Oktober tahun 2023-2024.

vii) Identifikasi, Analisis dan Kajian Pemberlakuan SNI Wajib

Realisasi anggaran kegiatan ini sampai dengan akhir triwulan keempat 2024 sebesar Rp 248.136.930,00 (91,24%) dan realisasi fisik sekitar 99,98%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan pedoman dan juklak dalam mengimplementasikan SNI



Gambar 20. Penyusunan pedoman dan juklak penerapan SNI

- Melakukan koordinasi standarisasi



Gambar 21. Koordinasi standarisasi

- Koordinasi terkait Usulan RO BrMP untuk Standardisasi



Gambar 22. Koordinasi usulan RO-BrMP

2) Perumusan PNPS Pascapanen Pertanian

Realisasi anggaran kegiatan ini sampai dengan akhir triwulan keempat 2024 sebesar Rp 34.053.508,00 (69,65%) dan realisasi fisik sebesar 100%, dengan perkembangan kegiatan PNPS yaitu:

- Mengajukan judul PNPS 2025 ke BSN

Judul-judul yang diajukan merupakan hasil akhir pembahasan judul PNPS melalui forum FGD pada tanggal 16 Oktober 2024 secara online yang diikuti oleh BPSI selindo terutama Babel, Lampung, Kaltim untuk potensi penerapan SNI bidang pascapanen lada; Kalbar, Jatim untuk potensi penerapan SNI proses berasan jagung; dan Jabar, Sulsel, NTB untuk potensi penerapan pengeringan cabai; dan

peserta swasta (UKM Lestari; PT Agro Zee Annur).

- Audiensi dengan swasta calon penerap SNI (dari topik usulan PNPS yang akan diajukan) untuk memperoleh kesediaan menerapkan standar.

Kegiatan ini belum dilaksanakan karena menunggu upload terlebih dahulu 4 judul yang diusulkan ke SISPK laman BSN. Namun, telah direncanakan akan audiensi ke Koperasi Eptilu di Garut tanggal 31 Oktober 2024 untuk audiensi potensi atau kesediaan menerapkan SNI pengeringan cabai nantinya.



- Gambar 23. FGD pengajuan judul PNPS ke BSN

- Melaksanakan kegiatan audiensi kepada calon penerap SNI dari PNPS 2025 ke Garut Jabar (Koperasi Eptilu) dan Madiun-Jatim (UKM Lestari Abadi).

Kegiatan ini telah dilaksanakan di Koperasi Eptilu Garut. Koperasi Eptilu merupakan salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang pascapanen cabai (pengeringan cabai dan diversifikasi produknya). Ketua Koperasi Eptilu mempresentasikan alur proses pengeringan cabai yang biasa dilakukan hingga menghasilkan cabai kering dengan mutu yang baik. Koperasi Eptilu memiliki lahan pertanian cabai seluas 3Ha.



Gambar 24. Audiensi proses pascapanen/pengeringan cabai di Koperasi Eptilu-Garut, Jawa Barat

- Melaksanakan diskusi/konsultasi ke Kebun Percobaan BSIP TROA di Sukamulya-Sukabumi.

Kegiatan ini merupakan tahap persiapan untuk diadakannya audiensi dengan calon penerap SNI penanganan lada. Selain menyediakan benih tanam, KP Sukamulya juga mengolah buah lada untuk menghasilkan lada putih dan lada hitam.



Gambar 25. Diskusi proses penanganan pascapanen lada di Kebun Percobaan Sukamulya, Sukabumi, Jawa Barat

- Melaksanakan kegiatan audiensi dengan zoom meeting kepada calon penerap SNI berasan jagung (UMKM Lestari, Madiun)

Kegiatan ini telah dilaksanakan di kantor BBPSI Pascapanen Pertanian pada tanggal 9 Desember 2024 melalui zoom meeting dengan narasumber UMKM ibu Lestari dan ketua Asosiasi UMKM Madiun bapak Kusbeni Abdulloh. Paparan dari ibu Lestari. Pascapanen jagung terdiri atas tahap panen, pengumpulan, dan pengeringan. Untuk tahap panen dilakukan oleh petani, jagung diambil langsung dari petani di Madiun. Karena masih banyak petani jagung, maka harganya relatif murah. Potensi usaha berasan Jagung di Madiun yang cukup besar mengingat produksi jagung yang tinggi. Tantangannya adalah produksi berasan jagung dapat dikembangkan di negara-negara yang juga mengkonsumsi jagung.



Gambar 26. Audiensi proses produksi berasan jagung dengan UMKM Lestari, Madiun, Jawa Timur

- Melaksanakan kegiatan audiensi dengan zoom meeting kepada calon penerap SNI penanganan pascapanen lada

Kegiatan ini telah dilaksanakan di kantor BBPSI Pascapanen Pertanian pada tanggal 10 Desember 2024 melalui zoom meeting dengan narasumber bapak Dwi Sungkowo sebagai penangkar benih lada Purbalingga dan drh. Supriyono sebagai pelaksana teknis proyek UPLAND-Kementan di Purbalingga. Paparan bapak Dwi Sungkowo.



Gambar 27. Audiensi penanganan pascapanen lada dengan pelaksana teknis proyek UPLAND-Kementan di Purbalingga, Jawa Tengah

3.1.2. Produk Instrumen Pascapanen Pertanian Terstandar yang dihasilkan

Salah satu produk RSNI yang telah dihasilkan oleh BBPSI Pascapanen Pertanian adalah RSNI No 3389:2023 yaitu rancangan SNI lombok kering yang merupakan revisi dari SNI yang telah ada sebelumnya (SNI 01-3389-1994).

Cabai merupakan komoditas hortikultura di Indonesia yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Cabai digunakan untuk keperluan rumah tangga dan juga dapat digunakan untuk keperluan industri diantaranya, industri bumbu masakan dan industri makanan.

Ketersediaan dan kebutuhan cabai merah di masyarakat sangat tidak stabil. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti cuaca, bencana, hama, dan sebagainya.

Keadaan demikian merupakan permasalahan pertanian yang sering dihadapi di masyarakat. Pada saat produksi meningkat, harga cabai merah relatif rendah. Pada saat produksi cabai merah menurun, harga cabai merah akan meningkat karena terjadi kelangkaan komoditas.

Salah satu cara untuk menjaga ketersediaan cabai merah adalah dengan cara dikeringkan. Untuk menjaga kualitas cabai yang sudah dikeringkan (Cabai Kering) ini, pada tanggal 29 Desember 2023 Badan Standardisasi Nasional sudah menetapkan SNI 3389:2023 untuk Standar Mutu Cabai Kering.

3.1.3. Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan

Pendampingan penerapan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian merupakan suatu upaya untuk membina dan mengawal penerapan standar instrumen pascapanen pertanian (SNI/PTM/standar mutu lain) untuk meningkatkan produksi, kualitas, nilai tambah dan daya saing untuk kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.

Diseminasi standar instrumen pascapanen pertanian merupakan upaya untuk penyebaran informasi terkait SNI produk maupun teknologi pascapanen pertanian yang bertujuan untuk menginformasikan, meningkatkan pengetahuan, menggugah minat, dan meningkatkan keterampilan pengguna terhadap standar instrumen pascapanen pertanian.

BBPSI Pascapanen Pertanian secara aktif melakukan diseminasi terkait penyebaran informasi dan penerapan standar instrumen pascapanen pertanian bagi pelaku usaha, UMKM, siswa, mahasiswa, dan stakeholder lain. Diseminasi SNI yang dihasilkan telah dilakukan sosialisasi secara online kepada stakeholder dan petani serta BSIP Penerapan seluruh Indonesia. Salah satu kegiatan diseminasi SNI adalah kegiatan Sosialisasi SNI 3743:2021 Gula Palma. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen Pertanian) mengadakan acara sosialisasi SNI 3743:2021 tentang gula palma. Acara ini dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 9 Oktober 2024 di Bogor.

3.1.4. Lembaga Penerap Standar yang didampingi

Penyidikan dan Pengujian Produk

Realisasi anggaran kegiatan sampai dengan akhir triwulan keempat 2024 adalah Rp 80.384.482,00 (44,95%) dan realisasi fisik 95%, dengan perkembangan kegiatan pengelolaan dan pengembangan laboratorium sebagai berikut:

- Penerbitan Lembar Hasil Pengujian (LHU) Laboratorium Pengujian BBPSI Pascapanen Pertanian

Laboratorium BB Pascapanen Pertanian merupakan laboratorium kompeten yang terdaftar sebagai laboratorium terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor LP 366 IDN dan sebagai laboratorium PUP (Penyelenggara Uji Profisiensi) ISO 17043:2010 dengan nomor PUP-024-IDN. Selama bulan Oktober (hingga tanggal 30 Oktober tahun 2024), Laboratorium Pengujian BBPSI Pascapanen Pertanian telah menerbitkan 111 Lembar Hasil Pengujian (LHU). Selama bulan November (hingga tanggal 28 November tahun 2024), Laboratorium Pengujian BBPSI Pascapanen Pertanian telah menerbitkan 16 Lembar Hasil Pengujian (LHU). Pada tahun 2024, target LHU yang diterbitkan adalah 199 produk. LHU yang telah diterbitkan pada periode Januari – Desember sebanyak 208. Berdasarkan data tersebut, maka target LHU tahun 2024 telah tercapai (104,52%). Selain pengujian, pelanggan juga mendaftarkan sampel untuk dipreparasi saja menggunakan peralatan yang ada di laboratorium, seperti freeze dryer, ultraturax, dan HPH. Sampel yang hanya dipreparasi tanpa dilakukan pengujian tidak dapat diterbitkan LHU.

- Audit Internal LPK BBPSI Pascapanen Pertanian

Pelaksanaan audit internal dilaksanakan terhadap persyaratan umum, persyaratan organisasi (struktural), persyaratan sumberdaya, persyaratan proses dan persyaratan manajemen. Dari hasil audit internal terdapat 30 temuan ketidaksesuaian yang telah diverifikasi yang terdiri dari 6 temuan ketidaksesuaian persyaratan umum (klausul 4), 2 temuan ketidaksesuaian persyaratan organisasi (klausul 5), 7 temuan ketidaksesuaian persyaratan sumberdaya (klausul 6), 10 temuan ketidaksesuaian persyaratan proses baik ISO 17025, 17043 dan 17065 (klausul 7) dan 5 temuan ketidaksesuaian persyaratan manajemen (klausul 8). Penyelesaian temuan audit internal baik analisis akar masalah, tindakan penyelesaian, tindakan korektif dan bukti penyelesaian audit internal dilakukan oleh

masing-masing auditee. Hasil audit internal menunjukkan adanya komitmen dari seluruh personel untuk menerapkan sistem manajemen mutu di LPK BBPSI Pascapanen Pertanian sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2023 dan SNI ISO/IEC 17065:2012 secara konsisten. Namun demikian pada audit internal ini masih terdapat 29 temuan ketidaksesuaian. Pada umumnya ketidaksesuaian ditemukan karena ada beberapa rekaman yang belum lengkap, kaji ulang dokumen belum efektif, dan terkait sumber daya dan personel yang merupakan dampak dari reorganisasi. Audit internal telah diselesaikan dan dinyatakan closed. Sebanyak 29 temuan telah diperbaiki dan diverifikasi.

- Penyelenggaraan Uji Profisiensi

Kegiatan PUP pada bulan Oktober 2024 adalah pengolahan data untuk uji stabilitas dan uji homogenitas objek UP, serta pengolahan data peserta. Uji stabilitas merupakan serangkaian pengujian yang dilakukan untuk menjamin bahwa suatu produk bersifat stabil atau tetap memenuhi spesifikasi dalam kemasannya dan kondisi penyimpanan yang sesuai sampai periode waktu tertentu. Uji homogenitas adalah prosedur uji statistik yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa dua atau lebih kelompok sampel data diambil dari populasi yang memiliki varians yang sama.

- Penyampaian Uji Profisiensi

Berdasarkan hasil pengolahan statistik terhadap data parameter kadar air, beras kepala, beras patah dan kadar amilosa dapat diketahui laboratorium yang memperoleh kategori memuaskan, diperingatkan, outlier sedangkan untuk parameter derajat sosoh terdapat dua kategori kinerja laboratorium yaitu memuaskan dan tidak memuaskan. 26 laboratorium peserta dikategorikan memuaskan untuk parameter kadar air, 23 laboratorium peserta dikategorikan memuaskan, 1 laboratorium peserta dikategorikan diperingatkan dan 2 laboratorium peserta dikategorikan outlier untuk parameter beras kepala, 22 laboratorium peserta dikategorikan memuaskan dan 4 laboratorium peserta dikategorikan outlier untuk parameter butir patah, 6 laboratorium peserta dikategorikan memuaskan, 1 laboratorium peserta dikategorikan diperingatkan dan 2 laboratorium peserta dikategorikan outlier untuk parameter kadar amilosa, serta 11 laboratorium peserta dikategorikan memuaskan dan 14 laboratorium peserta dikategorikan tidak memuaskan untuk parameter derajat sosoh.

- Pelaksanaan audit halal LPH BBPSI Pascapanen Pertanian
LPH BBPSI Pascapanen Pertanian pada bulan Oktober ini telah melakukan audit untuk 1 pelaku usaha, yaitu Pondok Nasi Bakar JJS dengan ruang lingkup makanan dan minuman dengan pengolahan.



Gambar 28. Audit Internal LPK BBPSI Pascapanen

- Persiapan audit internal
Dalam rangka mempersiapkan audit internal dilaksanakan pertemuan yang dibuka oleh Kapoksi KLSI dan dihadiri oleh Pengelola LSPro, LPH, Lab Pengujian, dan PUP BBPSI Pascapanen Pertanian. Persiapan meliputi pembentukan tim auditor, penunjukan ketua auditor, mekanisme dan jadwal audit
- Sidang Fatwa MUI
Pada tanggal 20 November 2024, LPH BBPSI Pascapanen Pertanian telah melakukan Sidang Fatwa MUI untuk Pelaku Usaha Pondok Nasi Bakar JJS. Saat ini prosesnya sedang menunggu Draft Keputusan Halal disusun dan di tanda tangani oleh Pihak MUI dan Kepala LPH BBPSI Pascapanen Pertanian untuk selanjutnya diupload Sertifikat Keputusan Halal tersebut di aplikasi sihalal.
- Kaji Ulang Manajemen
Kaji ulang manajemen adalah kegiatan evaluasi formal untuk menilai keefektifan dan efisiensi penerapan sistem manajemen. Berdasarkan Panduan Mutu LPK BBPSI Pascapanen, manajemen LPK BBPSI Pascapanen Pertanian melaksanakan kaji ulang manajemen setidaknya minimal sekali dalam setahun. Kaji ulang manajemen bertujuan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem manajemen, melihat capaian sasaran mutu dan kebijakan mutu yang telah diterapkan serta untuk mengetahui perubahan maupun peningkatan yang diperlukan

- oleh LPK BBPSI Pascapanen sesuai dengan pemenuhan SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2023, dan SNI ISO/IEC 17065:2012. Kaji ulang manajemen berlangsung secara hybrid mencakup dua lokasi yaitu Bogor dan Karawang yang diselenggarakan pada tanggal 11 – 12 Desember 2024 di Aula lantai 2 BBPSI Pascapanen Pertanian. Kegiatan kaji ulang manajemen dibuka oleh Kepala LPK dan dihadiri oleh seluruh personel LPK.
- Penyusunan Laporan Akhir Tahun
Telah dilakukan penyusunan laporan akhir tahun kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium. Pada tahun 2024 keluaran yang diperoleh adalah:
 - a) Layanan jasa pengujian yang operasional
 - b) Akreditasi KAN sebagai laboratorium uji dan laboratorium PUP
 - c) Sumber daya manusia laboratorium yang kompeten.
 - Sidang Fatwa MUI
Pada tanggal 18 Desember 2024, LPH BBPSI Pascapanen Pertanian telah melakukan Sidang Fatwa MUI untuk Pelaku Usaha Pondok Sagu Metro. Saat ini prosesnya sedang menunggu Draft Keputusan Halal disusun dan di tanda tangani oleh Pihak MUI dan Kepala LPH BBPSI Pascapanen Pertanian untuk selanjutnya diupload Sertifikat Keputusan Halal tersebut di aplikasi sihalal.
 - Rintisan kerja sama dengan Masyarakat Singkong Indonesia
BBPSI Pascapanen Pertanian berencana melaksanakan kerja sama dengan Masyarakat Singkong Indonesia dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 - 1) Implementasi teknologi penanganan ubi kayu sebagai bahan baku produksi mi ubi kayu;
 - 2) Implementasi teknologi produksi mi ubi kayu;
 - 3) Uji pasar dan promosi mi ubi kayu dalam rangka komersialisasi;
 - 4) Pemasaran produk mi ubi kayu produksi.Kerja sama ini masih dalam tahap penjajakan
 - Kerja Sama MEDA
Kerja Sama Hibah berjudul The Implementation of The MEDA Project In Indonesia: A Mobile Eco Dryer for Agriculture (MEDA) dengan BioTanah Perancis, dilaksanakan pada periode Juli 2024 - Juli 2026. BBPSI Pascapanen Pertanian akan menerima hibah barang berupa 1 (satu) unit alat pengering gabah ramah lingkungan mobile

pada tahun 2025. Alat tersebut akan diuji lapang pada tingkat petani untuk memastikan fungsionalitas dan kinerja alat berjalan optimal serta dapat diaplikasikan pada lokasi yang dipilih yaitu Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkaitan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan koordinasi dengan BSIP Yogyakarta terkait kegiatan tersebut. BBPSI Pascapanen Pertanian juga berencana untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo terkait dengan kegiatan pelatihan MEDA.

3.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan strategis di BBPSI Pascapanen Pertanian diantaranya adalah realisasi keuangan yang masih rendah serta masih ada beberapa kegiatan dalam proses penyelesaian pertanggungjawaban administrasi. Namun demikian, hal ini tidak menghambat capaian fisik kegiatan tersebut.

Dalam upaya pemecahan permasalahan diatas dilakukan percepatan penyerapan anggaran sehingga capaian realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan dapat berjalan sinkron. Untuk mencapai hal ini diantaranya dengan melakukan penjadwalan kegiatan, manajemen pencairan anggaran untuk kegiatan, serta rencana aksi kegiatan untuk beberapa bulan ke depan.

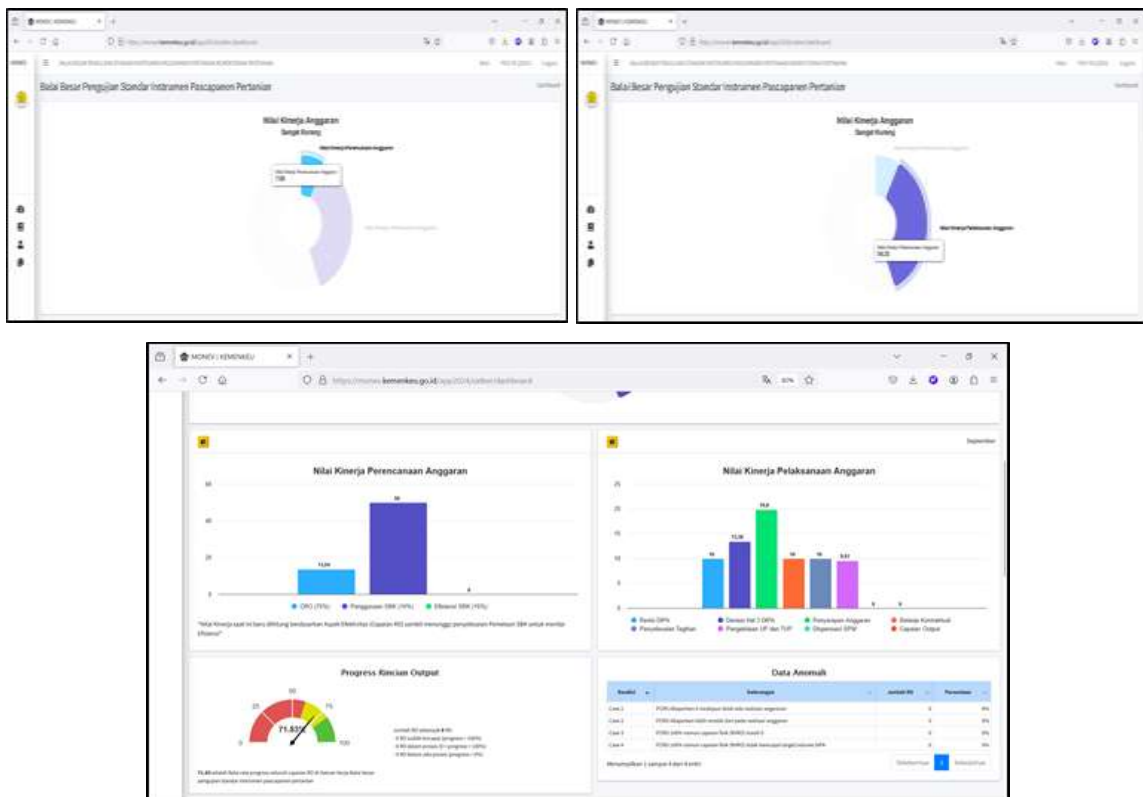
IV. KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN

4.1. Evaluasi Aplikasi Monev Online

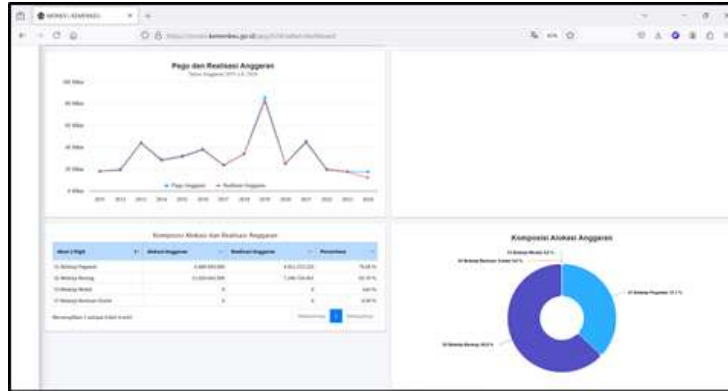
Terdapat 4 aplikasi monev online yang dilaporkan setiap bulan dari setiap satker di BSIP. Sampai dengan akhir triwulan empat 2024 berikut perkembangan laporan aplikasi monev online untuk kegiatan di BBPSI Pascapanen Pertanian:

4.1.1. Aplikasi SMART DJA

Sampai dengan akhir triwulan empat 2024, Nilai Aspek Kinerja Pelaksanaan Anggaran capaian masih 48.82%, dengan rincian: a) Revisi DIPA 10%, b) Deviasi Hal 3 DIPA 13.32%, c) Penyerapan Anggaran 19.69%, d) Belanja Kontraktual 10%, e) Penyelesaian Tagihan 10%, f) Pengelolaan UP dan TUP 9.62%, g) Dispensasi SPM 1%, capaian output 25%, dengan Progress Rincian Ouput 92.83%.



Gambar 29. Dashboard Nilai Kinerja Anggaran pada Smart DJA

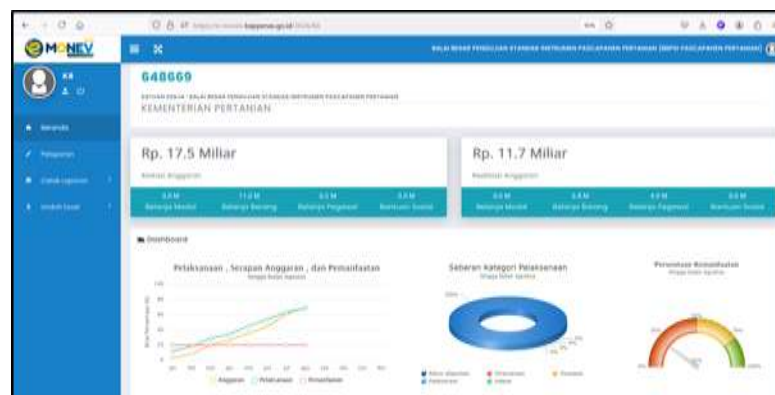


Gambar 30. Tabel komposisi alokasi dan realisasi anggaran pada aplikasi SMART-DJA

BBPSI Pascapanen Pertanian telah melakukan update realisasi keuangan dan fisik, serta perkembangan kegiatan sampai bulan Desember 2024 dengan RP16.423.084.531,00 (94,84%), dengan rincian realisasi belanja pegawai sebesar RP6.308.935.547,00 (97,21%), dan realisasi Belanja Barang sebesar Rp10.114.148.984,00 (93,42%) dengan progress rincian output sebesar 92,83%. Capaian IKPA BBPSI Pascapanen untuk sementara pada aplikasi Monev Smart Kemenkeu masih 71,85% dikarenakan pada aplikasi SAKTI belum dilakukan update data capaian output.

4.1.2. Aplikasi e-Monev Bappenas

Realisasi anggaran pada aplikasi e-monev Bappenas belum dapat diperbarui dikarenakan hingga akhir bulan Desember aplikasi e-Monev Bappenas sedang dalam proses internalisasi dan interkoneksi dengan aplikasi.

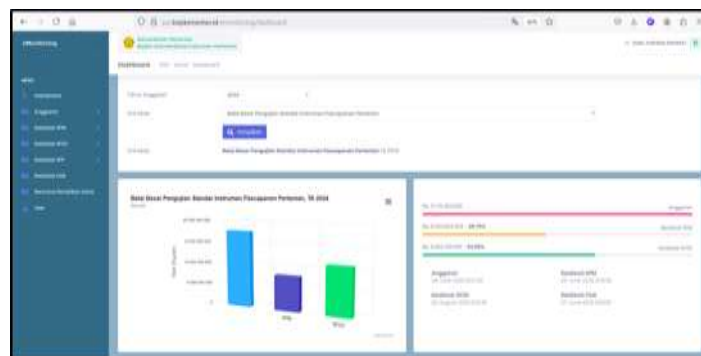


Gambar 31. Dashboard aplikasi e-monev Bappenas

Pada aplikasi e-monev Bappenas, di dashboard terlihat bahwa nilai persentase sebaran kategori pelaksanaan setiap kegiatan sebagian besar, a) Belum dilaporkan 0 %, b) Persiapan 0%, c) Perencanaan 0%, d) pelaksanaan 100%, e) Selesai 0%. Pelaksanaan dan serapan anggaran sampai akhir triwulan keempat 2024 sebesar Rp15.563.253.939,00 (89,87%) dari pagu anggaran Rp 17.316.564.000,00.

4.1.3. Aplikasi e-Monitoring BSIP

Pada aplikasi ini, realisasi anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian hingga akhir triwulan empat 2024 BBPSI Pascapanen Pertanian telah melakukan update realisasi keuangan dan fisik, serta perkembangan kegiatan hasil kegiatan sampai akhir triwulan keempat 2024 dengan rincian realisasi SPM sebesar Rp 8.092.859.889,00 (46,22%), realisasi SP2D sebesar Rp 16.423.084.531,00 (94,84%). Pada tampilan aplikasi emonev BSIP belum berubah dikarenakan adanya permasalahan atau hambatan dalam interkoneksi dengan aplikasi SAKTI.



Gambar 32. Dashboard aplikasi e-monev BSIP

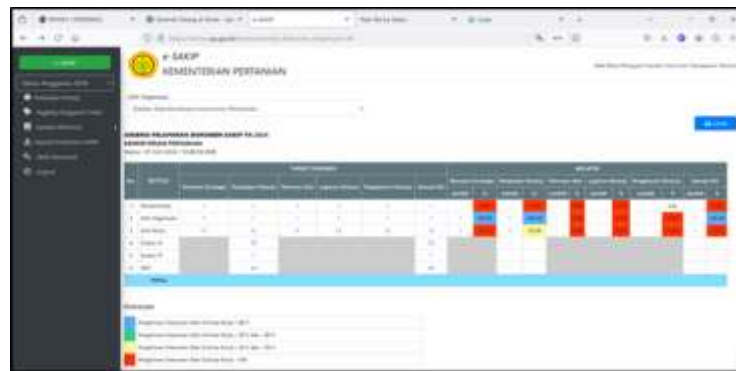
4.1.4. Aplikasi e-SAKIP Kementan

Data aplikasi e-SAKIP BBPSI Pascapanen Pertanian yang bersumber dari dokumen PK terdapat 3 Sasaran Kinerja (SK) yaitu :

1. SK1-Meningkatkan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dengan Indikator Kinerja (IK) IK1- Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan, realisasi/progres sampai akhir triwulan empat 2024 sudah tercapai sebanyak 4 RSNI3 atau 100% dari target
2. SK2-Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Beorientasi pada Layanan Prima dengan IK2- Nilai Pembangunan ZI menuju

WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian realisasi/progres sampai bulan Desember 2024 dengan nilai 90,02 atau 109,78% dari target

3. SK3-Terkelolanya anggaran BSIP yang akuntabel dan berkualitas dengan IK3- Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, realisasi/progres sampai bulan Desember 2024 masih 46,99 pada aplikasi Monev Smart Kemenkeu dikarenakan aplikasi SAKTI belum dilakukan update data capaian output.



Gambar 33. Tampilan aplikasi e-monev BSIP

4.1.5. Laporan Keuangan (Realisasi Anggaran)

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan empat 2024 sebesar Rp46.149.500,00 (72,11%) dan realisasi fisik sekitar 80%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan: Telah diterbitkannya Perubahan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
- Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran TUP

DIPA Pagu Anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian TA. 2024 yang terbit pada tanggal 24 Nopember 2023 memiliki pagu anggaran sebesar Rp18.549.452.000,00. Selama TA. 2024, sampai dengan akhir triwulan empat 2024, DIPA BBPSI Pascapanen Pertanian mengalami revisi sebanyak 16 (enambelas) kali. Revisi POK pertama pada tanggal 5 Januari 2024. Revisi ke-dua pada tanggal 23 Januari 2024, dengan pagu anggaran sebesar Rp17.549.452.000,00. Revisi ke-tiga pada tanggal 10 Februari 2024, merupakan revisi POK, dengan pagu anggaran tetap. Revisi ke-empat pada tanggal 15 Februari

2024, realokasi anggaran dengan pagu anggaran menjadi Rp17.510.452.000,00. Revisi ke-lima pada tanggal 4 April 2024, dengan pagu anggaran menjadi Rp17.610.452.000,00. Revisi ke-enam pada tanggal 22 April 2024 pergeseran akun dengan pagu anggaran tetap. Revisi ke-tujuh tanggal 29 Mei 2024 revisi halaman III DIPA dengan pagu anggaran tetap dan revisi ke-delapan buka blokir Program Teknis, PNBP dan penambahan anggaran pada sub-komponen monitoring program strategis Kementan dengan total pagu anggaran menjadi Rp 17.710.452.000. Revisi ke-sembilan pada tanggal 17 Agustus 2024 dengan total pagu anggaran tetap. Revisi ke-sepuluh terkait realokasi belanja pegawai dengan total pagu anggaran menjadi Rp 17.649.542.000. Revisi ke-sebelas pada tanggal 19 September 2024 merupakan revisi POK dengan total pagu anggaran menjadi Rp 17.710.452.000, dengan pagu efektif Rp 16.934.739,00 dan pagu blokir Rp 575.713.000,00. Revisi ke-duabelas pada tanggal 12 Oktober 2024 terkait RPD Halaman III DIPA periode Triwulan IV. Revisi ke-tigabelas pada tanggal 7 November 2024 terkait penurunan target PNBP BBPSI Pascapanen Pertanian dan PAGU penggunaan PNBP lingkup BSIP. Revisi ke-empatbelas pada tanggal 17 November 2024 terkait efisiensi belanja perjalanan dinas. Revisi ke-limabelas pada tanggal 28 November 2024 terkait Peningkatan Efektivitas & Kualitas Belanja pada Satker BSIP, penambahan pada kegiatan 002 sebesar Rp199.968.000,00 satker BBPSI Pascapanen Pertanian. Revisi ke-enambelas pada tanggal 5 Desember 2024 terkait Optimalisasi Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Pergeseran pada detil (akun) di RKAKL. Revisi ke-tujuhbelas pada tanggal 6 Desember 2024 terkait Optimalisasi Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Pergeseran pada detil (akun) di RKAKL. Berikut adalah resume dari revisi DIPA dan POK BBPSI Pascapanen Pertanian selama tahun 2024.

Tabel 1. Revisi DIPA dan POK BBPSI Pascapanen

No.	Uraian	Pagu Alokasi Anggaran	DIPA Terbit	Blokir	Anggaran Tersedia	Keterangan
1.	DIPA 1 POK 1	Rp17.549.452.000,00	5 Jan 2024	Rp1.808.602.000,00	Rp15.740.850.000,00	Drop RO Anjak, RO Hasil yang Disebarluaskan dan Blokir
2.	DIPA 2 POK 2	Rp17.549.452.000,00	23 Jan 2024	Rp1.950.213.000,00	Rp15.599.239.000,00	Blokir Automatic Adjustment (AA)
3.	DIPA 3 POK 3	Rp17.549.452.000,00	10 Feb 2024	Rp1.950.213.000,00	Rp15.599.239.000,00	Penyesuaian anggaran untuk pegawai PPNNP
4.	DIPA 4 POK 4	Rp17.510.452.000,00	15 Feb 2024	Rp1.950.213.000,00	Rp15.560.239.000,00	Perpindahan pegawai PPNNP
5.	DIPA 5 POK 5	Rp17.610.452.000,00	4 April 2024	Rp1.950.213.000,00	Rp15.660.239.000,00	Penambahan Anggaran Rp100.000.000,00 pada Program Dukman

						subkomponen Monitoring Program Strategis Kementan
6.	DIPA 6 POK 6	Rp17.610.452.000,00	22 April 2024	Rp1.950.213.000,00	Rp15.660.239.000,00	Rencana penarikan dana (RPD) pada aplikasi SAKTI, yang dituangkan dalam halaman III DIPA dan Pergeseran pada detil (akun) di RKAKL
7.	DIPA 7 POK 7	Rp17.610.452.000,00	29 Mei 2024	Rp1.950.213.000,00	Rp15.660.239.000,00	Rencana penarikan dana (RPD) pada aplikasi SAKTI, yang dituangkan dalam halaman III DIPA
8.	DIPA 8 POK 8	Rp17.710.452.000,00	6 Juni 2024	Rp575.713.000,00	Rp17.134.739.000,00	Buka blokir Program Teknis NTDSI, PNB dan penambahan anggaran Rp100.000.000,00 pada Program Dukman subkomponen Monitoring Program Strategis Kementan
9.	DIPA 9 POK 9	Rp17.710.452.000,00	4 Juli 2024	Rp477.507.000,00	Rp17.232.945.000,00	Rencana penarikan dana (RPD) pada aplikasi SAKTI, yang dituangkan dalam halaman III DIPA, pergeseran pada detil (akun) di RKAKL dan realokasi pada Program NTDSI subkomponen Penyusunan Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
10	DIPA 10 POK 10	Rp17.510.452.000,00	17 Sept 2024	Rp477.507.000,00	Rp17.032.945.000,00	Optimalisasi belanja pegawai lingkup BSIP dan perubahan akun penerimaan PNB
11	DIPA 10 POK 11	Rp17.510.452.000,00	19 Sept 2024	Rp477.507.000,00	Rp17.032.945.000,00	Pergeseran akun pada kegiatan/sub komponen
12	DIPA 11 POK 12	Rp17.510.452.000,00	12 Okt 2024	Rp477.507.000,00	Rp17.032.945.000,00	RPD Halaman III DIPA periode Triwulan IV tahun 2024

Belanja dalam rangka operasional kegiatan BBPSI Pascapanen Pertanian dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya seluruh kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Komposisi pagu anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian disajikan pada Tabel 3. Pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai Rp6.489.850.000,00 (38,2%), belanja barang Rp10.647.864.000,00 (58,6%), belanja PNB Rp 178.850.000,00 (3,2%). Pada Tabel 2 disajikan Realisasi anggaran (SP2D) sampai dengan akhir triwulan empat 2024 yaitu sebesar Rp. 16.430.218.070,00 (94,88%), dengan realisasi per jenis belanja yaitu

belanja pegawai sebesar Rp. 6.316.046.086,00 (97,32%), belanja barang sebesar Rp 9.935.446.002,00 (93,30%), dan belanja PNPB sebesar Rp. 178.725.982,00 (99,93%).

Tabel 2. Realisasi anggaran TA. 2024 sampai dengan triwulan empat 2024 berdasarkan jenis belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s/d akhir triwulan IV tahun 2024	
		Rp	%
Belanja pegawai	6.489.850.000,00	6.316.046.086,00	97,32
Belanja barang	10.647.864.000,00	9.935.446.002,00	93,30
PNBP	178.850.000,00	178.725.982,00	99,93
Total	17.316.564.000,00	16.430.218.070,00	94,88

4.2. Evaluasi Kegiatan Manajemen

4.2.1. Pengelolaan dan Pengembangan SDM

Pengelolaan Manajemen Kepegawaian (Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian): realisasi anggaran terhadap pagu non blokir dan pagu blokir kegiatan sampai dengan triwulan empat 2024 adalah Rp 33.823.000,00 (32,53%) dan realisasi fisik sekitar 90%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengusulan kenaikan pangkat sebanyak 12 pegawai
- 2) Pemrosesan kenaikan gaji berkala sebanyak 36 orang PNS
- 3) Pengusulan calon petugas belajar sebanyak 4 pegawai
- 4) Pengusulan pencantuman gelar PNS sebanyak 3 orang
- 5) Telah dilaksanakan Rekonsiliasi pemangku jabatan TMT 1 Desember 2024
- 6) Telah dilaksanakan pendaftaran 44 Calon PPPK BBPSI Pascapanen
- 7) Evaluasi laporan Kinerja Pegawai Tri Wulan 4

4.2.2. Pengelolaan Aset

i. Layanan Pelaksanaan Barang Milik Negara (BMN)

Realisasi anggaran kegiatan sampai dengan triwulan empat 2024 sebesar Rp33.439.000,00 (44,59%) dan realisasi fisik sekitar 80%.

Pengelolaan Rumah Tangga dan Perlengkapan realisasi anggaran kegiatan sampai dengan triwulan empat 2024 Rp 31.863.000,00 (48,46%) dan realisasi fisik sekitar 70%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut

1. Terlaksananya pelayanan kerumahtanggaan meliputi urusan tata kelola surat menyurat, kearsipan, pelayanan agenda rapat dinas, pelayanan komunikasi oleh operator, tata kelola perawatan kebersihan gedung dan lingkungan, serta pengendalian keamanan kantor
2. Terlaksananya pelayanan perlengkapan meliputi:
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana/aset kantor Bogor dan Karawang (pemeliharaan gedung kantor BB Pascapanen Bogor: pekerjaan pemeliharaan selasar, pekerjaan pengecatan pos satpam, pekerjaan pemeliharaan gedung kantor ruang pertemuan, pekerjaan pemasangan marka parkir motor, pekerjaan waterproofing coating dak beton, pemeliharaan pagar kantor BB Pascapanen Karawang: pemeliharaan perbaikan pilar pagar depan kantor Karawang, pekerjaan pemasangan kawat duri pagar kantor BBPSI Pascapanen Karawang, pemeliharaan peralatan dan mesin: pekerjaan perawatan instalasi air, perawatan mesin potong rumput, perawatan sarana pengujian (kalibrasi sarana pengujian, incubator, furnace/tanur, freezer dan timbangan digital), pemeliharaan lingkungan kantor dan penataan taman, pemeliharaan peralatan dan mesin: pekerjaan perawatan instalasi air, pekerjaan pemeliharaan kendaraan R2, R3, R4, perawatan software hardware komputer laptop printer, pemeliharaan jaringan: perawatan instalasi listrik dan peralatan kelistrikan), perawatan jaringan Hydrant, pemeliharaan lainnya: perawatan meubelair (kunci-kunci pintu, perawatan, akreditasi ISO 17043;
 - Kegiatan administrasi Barang Milik Negara menyiapkan tindak lanjut LHP Itjen No. R.152/PW.130/G.5/06/2024 berupa surat keterangan pencatatan BMN 2 (dua) unit kendaraan minibus Toyota Kijang B 1531 MQ dan pick up Toyota Kijang B 9515 EQ, tindak lanjut surat PEPI permohonan hibah mesin Biopellet dari Biomassa pertanian, menyusun laporan Triwulan IV tahun 2024 BMN, workshop verifikasi dan reuview LK BMN Triwulan IV tahun 2024, tutup periode 11 (November 2024) modul Aset aplikasi SAKTI, melakukan pencatatan saldo awal 2 (dua) unit kendaraan di Modul Aset,

penyusunan RKBMN tahun 2026. Pemeliharaan sarana dan prasarana/aset kantor Bogor dan Karawang (pemeliharaan gedung kantor BB Pascapanen: pekerjaan pemeliharaan gedung kantor BBPSI Pascapanen Pertanian/gd. selasar ruang AWR kantor Bogor, pemeliharaan lingkungan kantor: pemeliharaan saluran air kantor Karawang, pemeliharaan peralatan dan mesin: pekerjaan perawatan instalasi air, perawatan sarana pengujian, perawatan software hardware komputer, laptop, printer, perawatan mesin tik, perawatan LCD, perawatan mesin PABX, pekerjaan pemeliharaan kendaraan R2, R3, R4, , pemeliharaan jaringan: perawatan jaringan internet, perawatan instalasi listrik dan peralatan kelistrikan, pemeliharaan lainnya: perawatan tabung pemadam kebakaran); serta menyiapkan usulan RKBMN tahun 2026, tutup periode 10 (Oktober 2024) modul Aset aplikasi SAKTI.

ii. Layanan Umum

A. *Manajemen Tata Usaha dan Kelembagaan Internal*: realisasi anggaran kegiatan sampai dengan triwulan empat 2024 Rp 36.905.500,00 (55,68%) dan realisasi fisik sekitar 99%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Kegiatan ketatausahaan

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan BMN untuk periode Triwulan 3
- b. menyampaikan informasi kebutuhan jabatan fungsional penilai pemerintah (JF PP) dan Jabatan fungsional penata laksana barang (JF PLB)
- c. Koordinasi persiapan penilaian PIPK dengan tim sekertariat BSIP dan internal BBPSI Pascapanen Pertanian
- d. Melaksanakan kegiatan PIPK berupa survei pengujian pengendalian intern tingkat entitas
- e. pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian melalui audit internal, dan kegiatan pra audit serta melakukan wawancara calon lead auditor LsPRo Pascapanen

2. Koordinasi Kegiatan kelembagaan

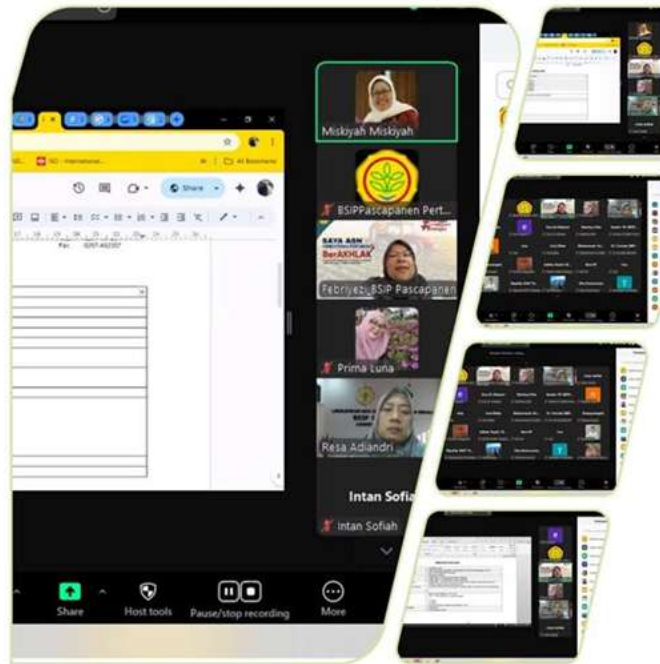
- a. Mengkoordinasikan dan Pengawasan pendaftaran P3K
- b. Mengikuti Rapim B Lingkup BSIP
- c. Koordinasi perencanaan pelaksanaan pengelolaan anggaran triwulan 4

- d. mengikuti pengukuhan ketua kelompok dan ketua tim kerja serta pelantikan eselon 3 dan 4 lingkup BSIP pada tanggal 14 Oktober 2024
 - e. Mengikuti Verifikasi Faktual peta jabatan prahum tanggal 29-30 Oktober 2024 di PSIPKH
 - f. Koordinasi perencanaan pelaksanaan pengelolaan anggaran triwulan 4
3. Kegiatan-kegiatan penguatan kelembagaan
- a. Melaksanakan internalisasi core values berahlak dan bangga melayani
 - b. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pegawai melalui kegiatan olahraga bersama setiap Jum'at, pengajian rutin setiap senin sampai dengan kamis setelah shalat dzuhur dan pengajian bulanan setiap jumat sore
 - c. Mengikuti penandatanganan Pakta Itegritas bersama Menteri Pertanian 29 Oktober 2024
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan pelatihan public speaking yang dilaksanakan tanggal 29 Oktober 2024.

B. Layanan Informasi Publik

Realisasi anggaran kegiatan sampai dengan triwulan empat 2024 Rp 49.864.500,00 (99,73%) dan realisasi fisik sekitar 98%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Sosialisasi SNI 3743:2021 Gula Palma
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen Pertanian) mengadakan acara sosialisasi SNI 3743:2021 tentang gula palma. Acara ini dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 9 Oktober 2024 di Bogor.



Gambar 34. Sosialisasi SNI Gula Palma

- BBPSI Pascapanen Pertanian Gelar Bimtek Penerapan SNI Cabai Kering di Garut
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian bekerjasama dengan BSIP Jawa Barat menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penerapan SNI 3389:2023 untuk cabai kering, di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Garut pada Kamis, 24 Oktober 2024. Acara ini diikuti oleh 150 peserta yang berasal dari petani, KWT, penyuluh dan pelaku usaha cabai di Kabupaten Garut. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian cabai di Kabupaten Garut dengan menerapkan standar SNI.
- BBPSIP Pascapanen Pertanian adakan Pelatihan Public Speaking
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen Pertanian) mengadakan pelatihan public speaking yang berlangsung pada tanggal 29 Oktober 2024 di Aula Lantai 2 BBPSI Pascapanen Pertanian, Bogor. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh pegawai BSIP Pascapanen dengan tujuan meningkatkan keterampilan komunikasi agar lebih efektif dalam menyampaikan informasi public.



Gambar 35. Pelatihan Public Speaking

- BBPSIP Pascapanen Pertanian Terima Kunjungan Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Riau
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen Pertanian) menerima kunjungan dari mahasiswa Program Studi Agribisnis dan Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Lancang Kuning (Unilak) Riau pada tanggal 18 November 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih dalam mengenai pengujian, standarisasi, dan teknologi pada sektor pascapanen pertanian.



Gambar 36. Kunjungan Universitas Lancang Kuning

- BBPSIP Pascapanen Pertanian Raih Predikat WBK Lingkup Kementerian Pertanian
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, menerima penghargaan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2024 dari Kementerian Kementerian Pertanian.
Penyerahan Penghargaan Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkungan Kementerian Pertanian, dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada Jumat, 13 Desember 2024, di Lapangan Upacara, Kementerian Pertanian, Jakarta.



Gambar 37. Penghargaan WBK lingkup Kementan

- BBPSIP Pascapanen Pertanian Raih Predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024

Pada ajang bergengsi ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen Pertanian) berhasil meraih predikat informatif kembali. Prestasi ini menjadi bukti nyata atas dedikasi BBPSI Pascapanen dalam mendorong perbaikan dalam pelayanan informasi public.



Gambar 38. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024

DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN PERIODE OKTOBER s/d DESEMBER 2024
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN
TAHUN 2024

Tabel 3. Daftar permohonan informasi publik

No	Tanggal Permohonan	Identitas Pemohon		Saluran Permohonan	Keragaman Informasi		Pengelolaan Informasi Publik	
		Nama Pemohon			Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Konsultasi dan Koordinasi	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
1	8 Oktober 2024	Usia*	31-40	Konter Layanan	Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 Hari
		Pekerjaan/Instansi	PNS				Status	Selesai
2	9 Oktober 2024	Nama Pemohon	Nabila	Konter Layanan	Informasi Publik yang diutuhkan pemohon	Konsultasi magang	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	<21		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/Instansi	Mahasiswa				Status	Selesai
3	21 Oktober 2024	Nama Pemohon	Rahmawati	Konter Layanan	Informasi Publik yang diutuhkan pemohon	Konsultasi nasi instan	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	>51		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/Instansi	Wiraswasta				Status	Selesai

4	21 Oktober 2024	Nama Pemohon	Rizki	Konter Layanan	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Konsultasi	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	41-50		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 Hari
		Pekerjaan/Instansi	PNS				Status	Selesai
5	11 November 2024	Nama Pemohon	Azrah Andriani	Konter Layanan	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Layanan Laboratorium	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	21-30		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 Hari
		Pekerjaan/Instansi	Swasta				Status	Selesai
6	11 November 2024	Nama Pemohon	Samudra Ihsan	Konter Layanan	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Konsultasi magang	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	<21		Kategori Informasi*	Kepegawaian	Waktu Pelayanan	1 Hari
		Pekerjaan/Instansi	Mahasiswa				Status	Selesai
7	11 November 2024	Nama Pemohon	Bima Prawang Saputra	Konter Layanan	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Konsultasi magang	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	<21		Kategori Informasi*	Kepegawaian	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/Instansi	Mahasiswa				Status	Selesai

8	11 November 2024	Nama Pemohon	Dhimas Agung	Konter Layanan	Informasi Publik yang diutuhkan pemohon	Konsultasi magang	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	21-30		Kategori Informasi*	Kepegawaian	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/ Instansi	Mahasiswa				Status	Selesai
9	11 November 2024	Nama Pemohon	Teguh Djoko	Konter Layanan	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Penawaran Jasa Laboratorium	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	>51		Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan	1 Hari
		Pekerjaan/ Instansi	Swasta				Status	Selesai
10	12 November 2024	Nama Pemohon	M. Tamam Sufyan	Konter Layanan	Informasi Publik yang diutuhkan pemohon	Penawaran Jasa Hotel	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	31-40		Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/ Instansi	Swasta				Status	Selesai
11	19 November 2024	Nama Pemohon	Heri	Konter Layanan	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Konsultasi Pengolahan Singkong Mokaf	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	41-50		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 Hari
		Pekerjaan/ Instansi	Wirausaha				Status	Selesai

12	19 November 2024	Nama Pemohon	Indah	Konter Layanan	Informasi Publik yang diutuhkan pemohon	Pelayanan laboratorium	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	21-30		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/ Instansi	Mahasiswa				Status	Selesai
13	19 November 2024	Nama Pemohon	Winda Fitria	Konter Layanan	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Pelayanan laboratorium	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	21-30		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 Hari
		Pekerjaan/ Instansi	Mahasiswa				Status	Selesai
14	25 November 2024	Nama Pemohon	Hendrik Sutian	Konter Layanan	Informasi Publik yang diutuhkan pemohon	Penawaran Jasa Pengiriman	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	41-50		Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/ Instansi	Swasta				Status	Selesai
15	25 November 2024	Nama Pemohon	Lulu Falah	Konter Layanan	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Teknologi Pengolahan Sukun	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	>51		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/	Wirausaha				Status	Selesai

		Instansi						
16	28 November 2024	Nama Pemohon	M. Rifa Yusuf	Konter Layanan	Informasi Publik yang diutuhkan pemohon	Informasi Magang	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	21-30		Kategori Informasi*		Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/Instansi	Mahasiswa				Status	Selesai
17	6 Desember 2024	Nama Pemohon	Albert Stephanus Pasuhuk	Konter Layanan	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Konsultasi Biofoam	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	41-50		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 Hari
		Pekerjaan/Instansi	Swasta				Status	Selesai
18	10 Desember 2024	Nama Pemohon	Bonauli	Konter Layanan	Informasi Publik yang diutuhkan pemohon	Penawaran Kerjasama Barang daan Jasa	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	<21		Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/Instansi	Swasta				Status	Selesai
19	10 Desember 2024	Nama Pemohon	Albertino	Konter Layanan	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Penawaran Kerjasama Barang daan Jasa	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	21-30		Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan	1 Hari
		Pekerjaan/Instansi	Swasta				Status	Selesai

20	10 Desember 2024	Nama Pemohon	Heri	Konter Layanan	Informasi Publik yang diutuhkan pemohon	Penawaran Pinjaman Pegawai	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	31-40		Kategori Informasi*	Keuangan	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/ Instansi	Swasta				Status	Selesai
21	10 Desember 2024	Nama Pemohon	Dinda Fitria Aluwih	Konter Layanan	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	Konsultasi Magang/PKL	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	<21		Kategori Informasi*	Kepegawaian	Waktu Pelayanan	1 Hari
		Pekerjaan/ Instansi	Mahasiswa				Status	Selesai
22	19 Desember 2024	Nama Pemohon	Muhamad Romdoni	Konter Layanan	Informasi Publik yang diutuhkan pemohon	Penawaran Kerjasama Barang daan Jasa	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	21-30		Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/ Instansi	Swasta				Status	Selesai
23	23 Desember 2024	Nama Pemohon	Anis Musyaffa	Konter Layanan	Informasi Publik yang diutuhkan pemohon	Konsultasi	Tindak Lanjut Petugas	Diberikan
		Usia*	21-30		Kategori Informasi*	Pertanian	Waktu Pelayanan	1 hari
		Pekerjaan/ Instansi	Mahasiswa				Status	Selesai

iii. Layanan Perkantoran

- a. Gaji dan Tunjangan: realisasi anggaran sampai dengan triwulan empat 2024 sebesar Rp 6.375.968.086,00 (98,25%) dan realisasi fisik sekitar 98%, dengan perkembangan kegiatan berupa pembayaran gaji dan tunjangan hingga bulan Desember 2024.
- b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor: realisasi anggaran sampai dengan triwulan empat 2024 sebesar Rp 7.248.226.181,00 (88,88%) dan realisasi fisik sekitar 90%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kebutuhan sehari-hari perkantoran dipergunakan untuk:

Pembayaran honor satpam, pengemudi, dan petugas kebersihan hingga bulan Desember 2024. Pembelian ATK, bahan pendukung komputer, bahan kimia, konsumsi rapat, langganan surat kabar dan bahan pendukung lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hingga bulan Desember 2024 kegiatan fisik perkantoran di Bogor dan Laboratorium Mutu Beras Karawang.
 - 2) Langganan daya dan jasa dipergunakan untuk Kegiatan pembayaran langganan daya dan jasa telah dilaksanakan yaitu untuk langganan Listrik PLN, langganan telepon, langganan air PDAM dan gas hingga bulan Desember 2024 yang mencakup kantor Bogor dan Laboratorium Karawang.
 - 3) Pemeliharaan perkantoran dipergunakan untuk:
 - Pembayaran pemeliharaan gedung kantor Bogor dan Karawang
 - Perawatan instalasi air
 - Perawatan AC
 - Perawatan kendaraan roda 2 dan 4 Bogor dan karawang
 - Perawatan sarana pengujian
 - Pemeliharaan Jaringan
 - 4) Pembayaran terkait operasional kantor dipergunakan untuk:
 - Pembelian penguat daya tahan tubuh bagi personil laboratorium
 - Pembayaran honor Satuan Kerja Bulan Oktober, November, Desember 2024
 - Pembayaran honorarium Pejabat KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, PPABP, Staf Pengelola, Pengelola SAI, Bendahara Pengelola Pnbp, Anggota pengelola Pnbp, Pejabat pengadaan barang/jasa, pengurus/penyimpanan BMN untuk bulan Oktober, November dan Desember 2024

- Pembayaran honor Satuan Kerja hingga bulan Desember 2024

iv. Layanan Manajemen Kinerja Internal

Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan empat 2024 sebesar Rp 157.690.353,00 (39,92%) dan realisasi fisik sekitar 90%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Program dan Anggaran realisasi anggaran terhadap pagu blokir dan non blokir sampai dengan akhir triwulan keempat 2024 sebesar Rp 158.991.353,00 (40,25%) dan realisasi fisik sekitar 95%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:
 1. Rapat Pimpinan A lingkup Kementan
 2. Rapat Pimpinan B lingkup BSIP
 3. Koordinasi Internal Kelompok Substansi Program dan Evaluasi
 4. Grand Desain BSIP
 5. Penelitian dan Reviu Usulan Revisi PNBP TA 2024



Gambar 39. Penelitian dan review usulan revisi PNBP

6. Perencanaan Pagu Alokasi Anggaran 2025 dan Renstra Kementan
7. Blue Print Kementan 2025-2029 dan dukungan BBPSI Pascapanen Pertanian
8. Koordinasi perencanaan untuk standardisasi
9. Revisi Perjanjian Kinerja (PK) terkait penyesuaian dengan terbitnya DIPA/POK revisi
10. Koordinasi penyusunan Grand Desain BSIP 2025-2029
11. Renstra 2025-2029 untuk Standardisasi
12. Penelitian dan Reviu Usulan Revisi PNBP TA 2024

13. Perencanaan BPMP 2026 untuk Standardisasi

- 2) Koordinasi Institusional realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan keempat 2024 sebesar Rp 99.989.105.000,00 (61,34%) dan realisasi fisik sekitar 65%, dengan perkembangan kegiatan Koordinasi Perluasan Areal Tanam (PAT) dan Pompanisasi di Provinsi Sulawesi Barat.

v. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

a. Pelaksanaan Monev, SPI Manajemen Risiko Index, Reformasi Birokrasi

Realisasi anggaran terhadap pagu blokir dan non blokir sampai dengan triwulan keempat 2024 sebesar Rp 49.861.857,00 (66,84%) dan realisasi fisik sekitar 90%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut: hingga bulan Desember 2024, BBPSI Pascapanen Pertanian telah melakukan penyusunan laporan rutin yang merupakan tugas dan fungsi terkait evaluasi dan pelaporan yaitu (1) laporan perkembangan kegiatan Balai hingga bulan Desember, (2) laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat hingga bulan Desember, (3) laporan Pengelola Gratifikasi hingga bulan Desember, (4) laporan pengelolaan penanganan benturan kepentingan hingga bulan Desember, (5) Tersusun laporan bulanan kegiatan BBPSI Pascapanen Pertanian hingga bulan Desember, (6) laporan Matrik realisasi KRO-RO kegiatan BBPSI Pascapanen Pertanian hingga bulan Desember, (7) laporan SPI bulan hingga Desember, (8) update data aplikasi e-monev hingga bulan Desember, (9) penyusunan renaksi, (10) penyusunan manajemen risiko indeks, (11) Pelaksanaan workshop Penyusunan dan Evaluasi Laporan Kegiatan Triwulan III Tahun 2024 lingkup BSIP, (12) Pelaksanaan Penilaian Mandiri Zona Integritas lingkup BSIP.



Gambar 40. Pelaksanaan evaluasi kegiatan Triwulan III



Gambar 41. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Zona Integritas lingkup BSIP

b. Monitoring Program Strategis Kementan

Realisasi anggaran terhadap pagu blokir dan non blokir sampai dengan triwulan keempat 2024 sebesar Rp 199.944.996 (99,97%) dan realisasi fisik sekitar 99%, dengan perkembangan kegiatan koordinasi Perluasan Areal Tanam (PAT) dan Pompanisasi di Provinsi Sulawesi Barat.

4.3. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen di BBPSI Pascapanen Pertanian diantaranya:

- realisasi keuangan masih rendah dikarenakan beberapa kegiatan mengacu kepada pelaksanaan kegiatan di BSIP dan pembukaan blokir anggaran baru saja dilakukan serta masih ada beberapa kegiatan dalam proses penyelesaian pertanggungjawaban administrasi
- realisasi keuangan terhadap pagu total masih rendah dikarenakan terdapat automatic adjustment pada beberapa kegiatan, serta masih ada beberapa kegiatan dalam proses penyelesaian pertanggungjawaban administrasi.
- adanya revisi terhadap pagu anggaran yang sering berubah-ubah sehingga memerlukan koordinasi antar penanggungjawab kegiatan.

Beberapa rekomendasi sebagai upaya pemecahan terhadap permasalahan diatas diantaranya:

- Percepatan kegiatan internal sehingga penyerapan anggaran juga dapat berjalan cepat,
- Melakukan penjadwalan kegiatan serta rencana aksi kegiatan untuk beberapa bulan ke depan.

Adapun beberapa tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap rekomendasi tersebut diatas diantaranya:

- Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan
- Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan

V. KESIMPULAN DAN PENUTUP

5.1. Evaluasi Tindak Lanjut Triwulan Sebelumnya

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan, baik kegiatan teknis maupun dukungan manajemen, selama tiga bulan sebelumnya (Juli-September 2024) diperoleh hasil bahwa semua rekomendasi telah ditindaklanjuti, sehingga pelaksanaan kegiatan pada semua bagian dan layanan yang tersedia di Balai Besar Pengujian Standard Instrumen Pascapanen Pertanian dapat berjalan efektif dan relevan.

5.2. Kesimpulan

1. Pada Perjanjian Kinerja TA.2024, BBPSI Pascapanen Pertanian telah menetapkan tiga sasaran yang akan dicapai beserta masing-masing indikator sasaran/kinerjanya. Untuk sasaran pertama "Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian", dengan indikator kinerja kegiatan berupa Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan, target tahun ini 4 Rancangan, sampai dengan akhir triwulan ketiga 2024 telah dihasilkan dua RSNI 3, yaitu RSNI Daun Rajangan Talas Beneng dan RSNI Bawang Merah untuk Konsumsi.
2. Sasaran kedua, "Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima", dengan indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 82 (Nilai). Sasaran ketiga, "Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas", dengan indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 85 (Nilai). Permasalahan utama dalam pencapaian target kegiatan adalah adanya blokir anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan agak terhambat. Ke depan diharapkan pelaksanaan kegiatan sudah berjalan sesuai perencanaannya dan bisa mencapai targetnya. Beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan telah diupayakan untuk diatasi, dan langkah-langkah yang telah ditempuh tersebut dapat dijadikan langkah antisipatif

dalam mengatasi hambatan dan kendala yang mungkin dihadapi pada pelaksanaan kegiatan ke depannya.

3. Total Anggaran DIPA Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17.116.596.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Manajemen Kinerja Internal. Sumber dana berasal dari Rupiah Murni Rp 16.937.746.000,00 dan PNBPN sebesar Rp178.850.000,00. Komposisi anggaran DIPA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan jenis belanja adalah (1) Belanja Pegawai sebesar Rp 6.489.850.000,00 (38.2%) (2) Belanja Barang Rp 10.647.864.000,00 (58.6%), belanja PNBPN Rp 178.850.000,00 (3.2%). Realisasi anggaran (SP2D) sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 16.430.218.070,00 (94,88%), dengan realisasi per jenis belanja yaitu belanja pegawai Rp 6.316.046.086 (97,32%), belanja barang Rp 9.935.446.002,00 (93,30%), dan belanja PNBPN sebesar Rp. 178.725.982,00 (99,93%).

5.3. Saran dan Penutup

Dengan disusunnya Laporan Triwulan ini, diharapkan adanya evaluasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan peningkatan kinerja BPBSI Pascapanen Pertanian pada tahun 2024 serta untuk periode selanjutnya. Laporan Triwulan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian.